

RINGKASAN

Wynda Satria Sasmita, 2017, **Implementasi Program Kartu Pencari Kerja(AK-1) (Studi Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)**, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Siti Rochmah, M.Si, 115 halaman+xvii.

Negara berkembang merupakan negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam masa berkembang. Dari sekian banyak negara yang sedang berkembang, akan sering membahas tentang permasalahan untuk memajukan negaranya contohnya permasalahan perekonomiannya, sosial dan budayanya, masyarakatnya atau warga negara dan bahkan tentang faktor lapangan pekerjaan. Karena faktor yang menentukan bagaimana suatu negara dapat dikatakan negara maju atau tidak dapat dinilai dari faktor-faktor tersebut. Seperti halnya di Indonesia dan Kota Batu banyak permasalahan yang dibahas salah satunya adalah faktor ketenagakerjaan. Untuk menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu mempunyai program namun bersifat tupoksi (kebijakan pemerintah) yaitu Kartu Pencari Kerja (AK-1). Kartu Pencari Kerja (AK-1) merupakan perwujudan suatu alat atau senjata dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketenagakerjaan, karena menyelesaikan masalah warga negara adalah tugas dari aparatur negara yang juga sudah tercantum Peraturan Menteri tentang penempatan tenaga kerja. Permasalahan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya karena belum memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menggali bagaimana implementasi program kartu pencari kerja (AK-1) di Kota Batu melalui wawancara kepada aparatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2010:20). Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah (1) implementasi program kartu pencari kerja (AK-1) di kota batu dan (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi program kartu pencari kerja (AK-1) di Kota Batu.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses Implementasi program kartu pencari kerja (AK-1) Kota Batu telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala. Dalam aspek komunikasi sosialisasi kartu pencari kerja telah terlaksana dengan baik, namun masih kurang maksimal dalam sosialisasinya. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu telah memiliki sumber daya manusia namun dari hasilnya masih terdapat kekurangan untuk efektivitasnya, sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup, namun belum ada sumber daya anggaran karena belum terdapat Rensta, sehingga kurang maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan aspek disposisi yang sangat baik aparturnya juga aspek struktur organisasi yang baik karena di dukung oleh pemerintah, namun belum terdapat Renja sehingga sedikit kurang terorganisir dalam prosesnya. Juga terdapat faktor pendukung, diantaranya terdapat kebijakan pemerintah atau landasan hukum, sumber daya sarana dan prasarana. Namun pelaksanaan ini terhambat oleh calon pencari kerja itu sendiri, dan kurangnya sosialisasi kartu pencari kerja kepada masyarakat dan instansi

SUMMARY

Wynda Satria Sasmita, 2017, **implementation process of the jobseekers card program (AK-1) in Batu City (Studies at the Department Social Welfare and Labor Agency of Batu City)**, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Siti Rochmah M.Si, 115 Pages+xvii.

Developing countries is a country whose people with well-being or quality of life level in moderate or developing stage. Many developing countries, would often discuss about issues to advance the country such as economic, social and cultural, society or citizens problems and even about the employment factor. Because the factors that determine how a country can be said as developed countries or not judged from these factors. As in Indonesia and Batu city many discussed problems, such as the employment factor. To address the employment problems in Batu City, Social Welfare and Labor Agency of Batu City has a program that is tupoksiin nature (government policy) that is the Job Seeker Card (AK-1). Job Seeker Card (AK-1) is the embodiment of a tool or weapon of the government to solve the employment problems, as solving the citizen problem is the duty of state apparatus which has been mentioned Ministry Regulation about the placement of worker. Employment issues shows that there are citizen whose right for basic needs unmet because not receive services from the government.

The research used qualitative descriptive approach aimed at understanding and exploring how the implementation of the jobseekers card program (AK-1) in Batu City through interviews to the apparatus of Social Service and Labor Agency of Batu City. This study used a model analysis of Miles and Hubbermanin Sugiyono (2010: 20). While problem limits in this study were (1) the implementation of the jobseekers card program (AK-1) in Batu City and (2) the inhibiting and supporting factors for the implementation of the jobseekers card program (AK-1) in Batu City.

The results concluded that the implementation process of the jobseekers card program (AK-1) in Batu City has been running, but still found some obstacles. In communication aspect, the socialization of jobseekers card has been performing well, but still less than maximum in socialization. Social Welfare and Labor Agency of Batu City has had human resources but of its results still there is a lack of effectiveness, facilities and infrastructure is sufficient, but there is no budget because there are no Rensta yet, so less than maximum. The study also showed an excellent disposition aspect for the apparatus, and also aspects of good organizational structure because supported by the government, but there is no Renja that making it less organized in the process. There is also a contributing factor, such are the government policies or legal basis, facilities and infrastructure. But the implementation is hampered by potential job seekers themselves, and lack of socialization for job seeker card to societies and institutions.